

**KAJIAN KARAKTERISTIK BERLOKASI PEDAGANG KAKI LIMA
(PKL) PADA KAWASAN PERDAGANGAN JALAN KARTINI KOTA
SEMARANG**

TUGAS AKHIR

Oleh :

OKTARINA DWIJAYANTI

L2D 002 424



**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2006**

ABSTRAK

Salah satu sektor informal di bidang perdagangan yang seringkali menimbulkan masalah perkotaan adalah pedagang kaki lima (PKL). PKL tersebut memiliki kecenderungan untuk berlokasi mendekati ruang-ruang fungsional kota. Tidak adanya ruang bagi PKL dalam RTRK terutama di ruang-ruang fungsional kota yang memiliki potensi berkembang PKL sehingga mereka menempati ruang-ruang publik yang tersedia. Salah satu kawasan tersebut adalah kawasan perdagangan Jalan Kartini dimana terdapat PKL pakan burung yang menempati boulevard karena berdekatan dengan Pasar Burung Karimata. Semakin lama PKL pada kawasan tersebut semakin berkembang dengan adanya PKL pakaian bekas dan beberapa PKL lain seperti pedagang makanan ataupun penjual jasa. Hal ini menjadikan sirkulasi pejalan dan kendaraan menjadi terganggu. Pemindahan lokasi ke area timur yang dilakukan pemerintah tanpa memperhatikan karakteristik berlokasi PKL menyebabkan PKL kembali ke lokasi asal, sekaligus bertambah jumlahnya dan menyebabkan ketidakteraturan kawasan serta kemacetan terutama pada saat peak hour.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukenali karakteristik berlokasi aktivitas PKL pada kawasan perdagangan Jalan Kartini. Adapun sasaran dari studi ini adalah mengidentifikasi karakteristik profil PKL, mengidentifikasi karakteristik aktivitas usaha PKL, mengidentifikasi karakteristik profil pengunjung PKL, mengidentifikasi persepsi PKL terhadap karakteristik lokasi dan tempat usaha PKL dan terakhir merumuskan karakteristik berlokasi PKL pada kawasan perdagangan Jalan Kartini. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif dimana menjadikan teori yang sudah diketahui sebelumnya sebagai dasar dalam merumuskan variabel-variabel penelitian, yang nantinya akan digunakan dalam proses pengumpulan data melalui penelitian survai (survey research). Pendekatan yang dilakukan meliputi pendekatan spasial untuk melihat lokasi PKL secara keruangan (fisik), pendekatan persepsi yang dilakukan terhadap PKL dan pengunjung serta pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menguraikan hasil analisis kuantitatif dalam wujud uraian/deskriptif. Teknik analisisnya meliputi deskriptif kuantitatif dan deskriptif komparatif dengan alat analisis distribusi frekuensi dan crosstab. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan secara primer dan sekunder.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan disimpulkan bahwa PKL merupakan alternatif lapangan kerja yang mudah ditembus oleh masyarakat dari tingkat pendidikan manapun. Selain itu PKL dapat menyediakan "economic cushion" (jaminan ekonomi) dalam situasi fluktuasi/ketidaktepatan pekerjaan. Hal tersebut ditunjukkan dari tingginya jumlah PKL Kartini setelah krisis moneter, didukung dengan pekerjaan sebelum menjadi PKL mayoritas bekerja sebagai pegawai swasta. Keberadaan PKL Kartini diperlukan oleh masyarakat umum dari berbagai golongan baik tingkat pendidikan, pendapatan maupun pekerjaan. PKL dapat memberikan kenyamanan yang tidak hanya barang yang murah dan berkualitas namun dapat dijadikan sarana rekreasi bagi pengunjung. Karakteristik berlokasi PKL Kartini dapat dilihat secara makro kawasan maupun mikro kawasan. Karakteristik berlokasi makro adalah karakteristik keseluruhan kawasan, sedangkan secara mikro adalah karakteristik tiap lokasi yang ada dalam kawasan tersebut sehingga menjadi lokasi pilihan berdagang PKL.

Karakteristik berlokasi PKL Kartini terkait dengan karakteristik aktivitas kawasannya. Karakteristik berlokasi secara makro adalah kestrategisan lokasi yang berada pada kawasan perdagangan dengan adanya pasar burung, kemudahan aksesibilitas yang didukung dengan ketersediaan jalan yang baik, memiliki keterkaitan aktivitas dengan kegiatan utama kawasan yakni pasar burung, adanya pengelompokan jenis dagangan PKL mendekati pasar burung, jenis dagangan utama yang dijual pakan burung, sangkar dan hewan peliharaan, menempati ruang hijau yang dapat memberikan kenyamanan dan kebutuhan akan ketersediaan prasarana terutama prasarana sampah. Sedangkan karakteristik berlokasi mikro menunjukkan adanya karakteristik tiap blok lokasi yang diminati PKL yakni pada Jl. Kartini I, Jl. Kartini II, Jl. Kartini dan Jl. Purwosari

Rekomendasi yang dapat diberikan kepada Pemerintah Kota terkait dengan aktivitas PKL Kartini adalah adanya stabilisasi (pengaturan ruang dan aktivitas) yakni waktu, sarana dan tempat berdagang serta manajemen pengelolaan PKL yang melibatkan PKL dan masyarakat sekitar (sektor formal) agar pengaturan tersebut berjalan serta ketegasan dari aparat, perlunya pengendalian pertumbuhan PKL pada kawasan tersebut dengan tindakan antisipatif dari aparat serta perlu adanya Juklak yang melingkupi PERDA PKL.

Kata kunci :

Karakteristik berlokasi, PKL, kawasan perdagangan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi di Indonesia yang dilakukan secara terencana dan mendasar yang dimulai pada akhir tahun 1960-an, tidak hanya menumbuhkan dan mengembangkan industri-industri besar serta program-program resmi pemerintah, yang dikenal dengan sektor formal, namun juga menumbuhkan usaha-usaha kecil yang dikelola oleh pribadi-pribadi yang sangat bebas menentukan cara bagaimana dan dimana usaha mereka dijalankan. Usaha yang sangat efektif melayani rakyat kecil itu diistilahkan dengan sektor ekonomi informal (Rachbini, 1994:3). Hal ini menjadikan timbulnya kondisi dualistis perkotaan dengan adanya sektor formal dan informal. Menurut Jan Bremen dalam Chris Manning (1996:139), sektor informal sering kali dikonsepsikan sebagai sektor ekonomi yang memiliki ciri-ciri tidak terorganisasi, tidak terdaftar dan tidak dilindungi oleh hukum, yang sering kali tercakup dalam istilah “usaha sendiri”.

Melihat dari istilahnya tersebut, sektor ekonomi informal seringkali dikonotasikan negatif, dimana keberadaannya hanya menimbulkan permasalahan perkotaan. Namun apabila ditelaah lebih jauh ke belakang, keberadaan sektor informal ini adalah karena sektor formal tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk menyerapnya. Kecenderungan yang ditemukan oleh Mc. Gee dalam Rachbini (1994:14) mengungkapkan bahwa di kebanyakan kota-kota di dunia ketiga, yang pesat perkembangannya ekonominya, sering tidak diimbangi oleh kesempatan kerja. Luapan angkatan kerja tersebut lalu tertampung di sektor informal dengan produktifitas yang bersifat subsisten yaitu hanya untuk mempertahankan hidup. Memang tidak semuanya, tetapi kebanyakan sektor informal mempunyai kapasitas produksi yang rendah karena pemupukan modal dan investasinya lemah.

Salah satu masalah yang paling sering muncul adalah kegiatan informal di bidang perdagangan, yaitu kegiatan pedagang kaki lima (PKL). Fenomena PKL ini terjadi karena ketidakseimbangan antara besarnya tenaga kerja yang tersedia dan kesempatan kerja, sehingga menuntut sebagian anggota masyarakat tersebut untuk mempertahankan hidupnya dengan menjadi pedagang kaki lima. Terjadinya krisis ekonomi moneter di Indonesia pada tahun 1998 menyebabkan banyak pihak menjadi korban terutama para buruh pabrik yang terkena PHK. Hal ini menjadikan mereka harus mencari peluang kerja baru yang antara lain terjun ke sektor informal, seperti menjadi PKL. Kondisi ini menyebabkan di beberapa kota besar di Indonesia tingkat pertumbuhan PKL selalu meningkat tiap tahunnya.

Tidak berbeda dengan sektor ekonomi informal, PKL yang merupakan bagian di dalamnya juga selalu dikonotasikan negatif dan dijadikan penyebab dari masalah kota yang ada. Mereka dianggap memberikan image ketidakteraturan kota, menyebabkan kemacetan lalu lintas akibat arus padat dari para pejalan kaki dan kendaraan bermotor, kondisi berjualan yang tidak higienis, dan sebagainya. Namun, terlepas dari sisi negatif yang ditimbulkan oleh sektor ini di perkotaan, PKL juga memiliki sisi positif yang menguntungkan baik bagi sisi konsumen maupun pemerintah. PKL dapat memberikan pelayanan ke publik dengan mencari lokasi yang aksesibel kepada konsumen dengan mengurangi biaya transportasi, menyediakan pekerjaan kepada masyarakat yang *unskilled*, berpendidikan rendah dan modal sedikit/kecil. Selain itu menurut McGee (1977:47) PKL dapat menyediakan "*economic cushion*" (jaminan ekonomi) dalam situasi fluktuasi/ketidaktepatan pekerjaan jika diperlukan. Adanya sisi positif dari para PKL tersebut, seharusnya para perencana kota lebih memperhatikan keberadaan mereka dalam tata ruang kota yang ada.

Lokasi berdagang PKL seringkali terkait dengan sektor formal yang ada disekitarnya. Dalam studi di Cali, oleh Bromley dalam Manning (1996:232) para pedagang kaki lima dijumpai dalam semua sektor kota, namun terutama berpusat di tengah kota di sekitar stadion dan pusat-pusat hiburan lainnya ketika ada pertunjukan yang bisa menarik sejumlah besar penduduk dan sekitar tempat-tempat pemberhentian sepanjang jalur bus. Hasil penelitian yang dikemukakan oleh Waworoentoe dalam Widjajanti (2000:28), PKL biasanya akan tumbuh berkembang pada ruang-ruang fungsional kota (pusat perdagangan/pusat perbelanjaan/pertokoan, pusat rekreasi/hiburan, pasar, terminal/pemberhentian kendaraan umum, pusat pendidikan, pusat perkantoran).

Kecenderungan PKL adalah tidak terlepas dari eksistensi sektor formal di daerah tersebut, dan dalam hal ini pemerintah pada umumnya hanya melakukan kegiatan sporadis dengan membebaskan jalanan dari kegiatan perdagangan liar, dimana hasilnya justru menciptakan masalah baru dan kebijakan yang lahir bukan untuk menyelesaikan akar masalah yang sebenarnya. Hal tersebut terjadi karena Pemerintah Kota tidak pernah menyediakan ruang bagi PKL dalam Rencana Tata Ruang Kota terutama di ruang-ruang fungsional kota dimana memiliki potensi untuk berkembangnya PKL.

Tidak adanya ruang bagi mereka dalam lokasi tersebut, menyebabkan tempat berjualan mereka selalu menempati area publik yang seharusnya dapat dimanfaatkan masyarakat kota, namun diprivatisasikan oleh PKL sehingga menimbulkan masalah kota. PKL sendiri pada dasarnya memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam memilih lokasi berdagang terkait dengan aktivitas usahanya, sehingga terdapat suatu karakteristik dalam mereka berlokasi.

Keberadaan PKL yang umumnya berada di kota-kota besar yang padat penduduknya, juga muncul di Kota Semarang. Beberapa kawasan fungsional di Kota Semarang saat ini berkembang aktivitas PKL yang cukup pesat yang keberadaannya mulai menimbulkan permasalahan serius bagi lingkungan di sekitarnya. Salah satu kawasan fungsional dimana PKL berkembang dengan pesat adalah di kawasan jalan Kartini. Koridor Jalan Kartini, sesuai dengan RDTRK BWK I Kota Semarang 2000-2010 memiliki fungsi sebagai area perdagangan dan jasa. Namun sekarang citra Jalan Kartini lebih dikenal sebagai area PKL burung dan pakaian bekas.

Kawasan Jalan Kartini dipilih menjadi lokasi dalam studi ini karena koridor tersebut memiliki fungsi sebagai area perdagangan dan jasa, dimana di lokasi tersebut terdapat beberapa sektor formal seperti ruko, pertokoan dan pasar sekaligus dekat dengan lokasi perumahan sehingga kecenderungan pertambahan PKL akan besar. Selain itu dilihat dari jenis dagangan yang dijual dimana memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dengan lokasi PKL lain di Kota Semarang, yakni terdapat PKL pakan burung dan PKL pakaian bekas.

Perkembangan PKL muncul pada awalnya dikarenakan terdapat pasar burung Karimata yang memiliki skala pelayanan kota, sehingga berkembang PKL yang menjual dagangan sejenis. Hal ini terkait dengan yang dikemukakan oleh McGee (1977:20) bahwa PKL hadir di mana-mana dan bergerak sepanjang jalan-jalan menjual barangnya, mengerumuni sekitar pasar umum atau mereka berada di sepanjang tepi jalan di berbagai bagian kota. Adanya kawasan PKL Barito di sebelah timur kawasan dan kedekatan kawasan dengan Jl. MT Haryono (Mataram) yang merupakan salah satu areal perdagangan Kota Semarang menjadikan aliran pengunjung ke kawasan ini cukup tinggi. Hal tersebut menjadikan daya tarik Kartini semakin besar untuk dijadikan lokasi berjualan bagi PKL.

Awalnya para PKL berkembang di Jalan Kartini bagian barat yang berdekatan dengan Jl. Dr. Cipto. Mereka berdagang secara liar di lokasi tersebut karena lokasinya yang dianggap strategis dengan tingkat kunjungan yang lebih tinggi. Berkembangnya area tersebut oleh PKL, menjadikan pada tahun 1999 pemerintah Kota Semarang mengeluarkan kebijakan untuk memindahkan PKL dengan menyediakan kios-kios semi permanen di sebelah timur yang juga menempati area ruang hijau di bagian tengah jalan. Hal ini sesuai dengan SK Walikota Semarang No. 511.3/16 Tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Semarang, bahwa lokasi PKL Kartini berada di Jl. Kartini Timur dengan batas areal mulai Jembatan Kali Banger sampai Jl. Barito yang menempati jalur pemisah. Namun, pemindahan lokasi yang tidak jauh dari lokasi semula menjadikan muncul kembali pedagang liar di tempat semula. Sebagian pedagang yang menempati area larangan juga merupakan anggota pedagang yang sudah memiliki kios semi permanen tersebut. Istilahnya mereka membuka cabang ataupun menjadikan kios semi